



**Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama**

**P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574**

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 17, Nomor 2, Juli - Desember, 2022

DOI: <https://doi.org/10.24042/al-adyan.v17i2.14755>

---

## **POLITIK IDENTITAS DAN TANTANGAN HUBUNGAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA**

**Idrus Ruslan**

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

*idrus.ruslan@radenintan.ac.id*

**Kiki Muhamad Hakiki**

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

*kiki.hakiki@radenintan.ac.id*

### **Abstract**

*The problem of inter-religious relations, especially in Indonesia, is actually always related to human life. This condition demands the readiness and readiness of the community to respect and accept all forms of inter-religious relations. However, the existence of this inter-religious relationship has made people trapped in the ambitions of the group and denying other groups. In the current context, this phenomenon is claimed to have strengthened identity politics in the midst of society. This study uses an approach that relies on library data sources in the form of scientific manuscripts both printed and online which are described with an in-depth and objective analysis of political problems with inter-religious relations in Indonesia. The results of this study revealed; There are still expressions of identity politics in Indonesia that are carried out irresponsibly and immaturity so that they can threaten the relationships between religions that have been built. Therefore, the expression and articulation of identity politics must be carried out on the basis of universal shared ideals and interests.*

### **Abstrak**

*Problem hubungan antar agama utamanya di Indonsia sesungguhnya selalu terkait dalam kehidupan manusia. Kondisi tersebut menuntut keterbukaan dan kesiapan masyarakat untuk saling menghormati dan menerima segala macam bentuk hubungan antar agama. Akan tetapi, adanya hubungan antar agama tersebut ternyata membuat masyarakat terjebak pada ambisi kelompok dan menafikan kelompok lain. Pada konteks kekinian, fenomena tersebut dikategorikan semakin menguatnya politik identitas di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada sumber-sumber data pustaka berupa naskah ilmiah baik cetak ataupun online yang dideskripsikan dengan menganalisis persoalan politik identitas dengan hubungan antar agama di Indonesia secara mendalam dan obyektif. Hasil penelitian ini mengungkapkan; ekspresi politik identitas di Indonesia masih ada yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab dan belum dewasa sehingga dapat mengancam hubungan antar agama yang telah terbangun. Oleh karena itu ekspresi dan artikulasi politik identitas haruslah dilakukan atas dasar cita-cita dan kepentingan bersama yang universal.*

**Kata Kunci :** *Politik Identitas, Hubungan Antar Agama*

## **A. Pendahuluan**

Problem hubungan antar agama sesungguhnya sesuatu yang sangat terkait dan inhern dalam kehidupan manusia. Diksi tersebut bisa dilihat dari berbagai dimensi, sebut saja misalnya bahwa manusia yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa secara beragam dan multikultural sehingga menuntut manusia itu sendiri untuk selalu berinteraksi, berkomunikasi atau jika menggunakan istilah agama – Islam–yaitu melakukan silaturahmi dan hubungan antar pemeluk agama. Tujuan Sang Maha Pencipta mendesain semua itu adalah ingin melihat manusia untuk saling mengenal dan melengkapi bukan untuk saling membunuh dan menghancurkan. Dalam semangat ini, salah seorang pemikir Muslim - Ibnu Khaldun–memberikan penjelasan bahwa “tidak boleh tidak, manusia harus bergotong royong dengan sesamanya. Jika gotong royong itu tidak dilaksanakan, maka manusia akan mendapat kesusahan. Sebaliknya jika manusia bergotong royong, terpenuhilah hikmat Tuhan agar manusia hidup berkelanjutan dan jenis bangsa manusia terpelihara”.<sup>1</sup> Semangat yang sama juga dikemukakan oleh Boisard; menurutnya apabila umat manusia tidak ingin kehidupannya mengalami kemusnahan, maka

---

<sup>1</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 73.

haruslah bekerjasama dan tolong menolong. Dengan bekerjasama dan bergotong royong, maka manusia akan mendapat jaminan keamanan dan keuntungan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, praktik hubungan antar agama dengan segala dinamikanya merupakan suatu keadaan yang tidak bisa tidak harus direspon oleh manusia secara aktif, positif dan kreatif dengan cara melakukan komunikasi, interaksi, dan silaturahmi diantara mereka.

Kenyataan tersebut ibarat air yang mengalir secara alami yang tidak boleh untuk dibendung. Manakala itu dilakukan, maka air akan meluap sehingga mengakibatkan banjir yang melanda dan tentu mengakibatkan kerugian bahkan kesengsaraan bagi umat manusia itu sendiri.

Pengibaratan diatas, terselip makna bahwa praktik hubungan antar agama merupakan fakta yang akan selalu dihadapkan atau selalu hadir dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Kondisi tersebut tentu saja sangat menuntut keterbukaan dan kesiapan individu dan kelompok manusia untuk saling menghormati dan menerima segala bentuk keragaman yang ada, karena memang manusia sesungguhnya adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Akan tetapi, dalam kenyataannya adanya hubungan antar agama tersebut ternyata membuat manusia terjebak pada ambisi individu dan kelompok sehingga menafikan individu dan kelompok lain.

Pada konteks kekinian fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai semakin menguatnya politik identitas di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, menurut Richard Thomson Ford, bahwa permasalahan politik identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru, hal tersebut dikarenakan semua politik memaklumkan keterlibatan unsur identitas, dan semua identitas bersifat politik. Namun, saat menggunakan frasa “politik identitas” (*politic of identity* atau *identity politics*), maka bermakna terfokus makna yang lebih spesifik. Politik identitas menunjukkan orientasi politik yang dibangun pada persoalan identitas sosial yang memang sebelumnya telah terbangun.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h.159.

<sup>3</sup> Richard Thomson Ford, “Political Identity as Identity Politics,” *UNBOUND* 53, no. 1 (2005): h. 53-57.

Meskipun menurut Ubed Abdillah, bahwa politik identitas merupakan wacana baru dalam kajian ilmu politik, karena bagi Ubed politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan fisik tubuh seperti jender, feminisme, maskulinisme, juga persoalan etnis serta persoalan perbedaan agama, kepercayaan dan bahasa.<sup>4</sup>

Menurut Harold D. Laswell yang dikutip oleh Syafuan Rozi bahwa politik identitas dapat diartikan sebagai cara dan kontestasi ikatan simbol kultural primordial (agama, suku, ras, kelompok) dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.<sup>5</sup> Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa politik identitas berawal dari menguatnya rasa kesukuan, keagamaan, kedaerahan dan lain sebagainya yang diekspresikan dalam bentuk ikatan primordial yang sangat kental dan ekspresif. Dalam makna yang seirama, Agnes Heller memberikan penjelasan bahwa politik identitas sesungguhnya dapat memunculkan solidaritas yang kuat diantara sesama individu yang tergabung sebuah kelompok atau ikatan. Akan tetapi sesungguhnya, solidaritas tersebut bersifat parsial sehingga mengakibatkan intoleransi, pertentangan, bahkan kekerasan antar kelompok identitas. Statemen Heller tersebut, terdapat kemiripan dengan pendapat Joseph Klien yang dikutip oleh Umar Suryadi Bakry yang mengatakan bahwa politik identitas adalah kecenderungan orang-orang dari ras, agama, jenis kelamin, atau etnis tertentu untuk mengatur secara politis seputar kepentingan khusus mereka dengan tujuan semata-mata untuk memajukan kepentingan ras, agama, jenis kelamin, atau etnis tersebut tanpa kepedulian atau perhatian pada atau kelompok kolektif lain yang bisa saja lebih besar.<sup>6</sup> Dengan begitu, politik identitas seringkali berhubungan dengan interes komunitas tertentu, baik yang berbasis etnis, agama, sosial, ekonomi, kultur, daerah, gender, pandangan politik dan lain sebagainya.

Dalam hubungannya dengan Indonesia yang merupakan negara plural (beragam) baik itu etnis, budaya, bahasa, ras, dan agama,

---

<sup>4</sup> Ubed Abdillah S, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas* (Magelang: Indonesiatara, 2002), h. 22.

<sup>5</sup> Syafuan Rozi, *Politik Identitas: Problematika Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 1.

<sup>6</sup> Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme & Identitas Politik Dalam Teori Dan Praktek* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 159.

pun tidak lepas dari ada dan menguatnya solidaritas antar kelompok, keetnisan, juga keagamaan. Apalagi semenjak reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pada awalnya gerakan *civil society* adalah untuk menggulingkan rezim Pemerintahan Orde Baru,<sup>7</sup> yang dapat dilihat betapa begitu kuatnya “solidaritas murni” ketika itu. Penggunaan term “solidaritas murni” disini bermakna bahwa dimana seluruh elemen bangsa Indonesia ketika itu, bersinergi untuk mengganti pemimpin (Presiden) tanpa melihat perbedaan latar belakang pada ragam elemen masyarakat. Akan tetapi, setelah tuntutan rakyat berhasil sehingga berganti dengan Orde Reformasi, ternyata fakta selanjutnya adalah menguatnya rasa kedaerahan, keetnisan termasuk juga keagamaan. Apalagi dengan berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, seakan menjadi peluang bagi sebagian masyarakat di daerah untuk “mengurus” daerahnya secara mandiri dan terkesan tidak terikat dengan pemerintah pusat.

Dalam konteks ini, Muhtar Haboddin menegaskan bahwa semakin deras dan menguatnya pengarusutamaan politik identitas adalah sejak diberlakukan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Tidak sedikit elemen kelompok masyarakat baik ditingkat daerah maupun nasional memanfaatkan momentum pemberlakuan Undang-Undang tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembagian kekuasaan (*power sharing*), dimana dalam praktiknya berakibat pada munculnya keinginan berbagai daerah untuk melepaskan diri dari urusan pemerintah pusat atau setidaknya keinginan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerahnya masing-masing secara tidak terbatas, seperti yang pernah terjadi di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Irian Jaya.<sup>8</sup> Begitu juga dengan daerah-daerah lain seperti Aceh, Maluku dan Bali.

Artikel ini akan menyoroti tentang menguatnya politik identitas masyarakat Indonesia terutama dalam hal keagamaan, sehingga tentu saja menimbulkan problem tersendiri bagi praktik

---

<sup>7</sup> Seperti diketahui bahwa rezim Orde Baru menerapkan hegemoni politik penyeragaman pada semua bidang, atau dengan kata lain realitas multikulturalisme merupakan suatu yang “haram” diberlakukan di Indonesia. Penerapan kebijakan tersebut tentu saja justru berakibat menguatnya solidaritas antar masyarakat sebagai kelompok yang tertindas, hingga pada akhirnya di tahun 1998 menjelma menjadi gerakan reformasi yang menumbangkan rezim tersebut.

<sup>8</sup> Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas Di Rumah Lokal,” *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1 (2012): h. 116-134.

hubungan antar agama dimana hal tersebut (hubungan antar agama) sesungguhnya merupakan fakta nyata yang ada dihadapan seluruh komponen bangsa ini yang seharusnya diapresiasi secara aktif, positif, kreatif, dan massif.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan berbagai masalah secara cermat dan detail dengan menghubungkan berbagai data, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas, akurat dan faktual sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada sumber-sumber data pustaka baik yang primer maupun sekunder berupa buku-buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel dan opini media cetak maupun online. Penelitian ini dideskripsikan dengan cara menganalisis persoalan politik identitas disatu sisi dengan hubungan antar agama di Indonesia disisi lain.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, kemudian diolah dan analisis secara obyektif dan mendalam melalui kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang diperoleh dari hasil bacaan terhadap sumber primer dan sekunder agar dapat disarikan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup>

## **C. Anatomi Politik Identitas**

Sebelum memperbincangkan korelasi politik identitas dengan tantangan dan problem hubungan antar agama yang ada baik di dunia maupun di Indonesia, terlebih dahulu akan dideskripsikan terminologi politik identitas. Sampai hari ini siapa sebenarnya yang mengintroduksi terminologi politik identitas itu untuk kali pertama belum begitu jelas. Namun secara substantif, politik identitas dihubungkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok

---

<sup>9</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 159.

sosial yang merasa termarginalkan oleh arus besar pada sebuah bangsa atau negara.<sup>10</sup>

Akan tetapi, menurut Syafi'i Ma'arif bahwa L.A. Kauffman lah yang kali pertama menarasikan hakikat politik identitas melalui pelacakan asal mulanya yaitu gerakan nir-anarkisme dikalangan mahasiswa yang disebut dengan SNCC (*the Student Nonviolent Coordinating Committee*). Gerakan tersebut yang tidak lain adalah sebuah organisasi di Amerika Serikat yang bergerak pada pembelaan hak-hak sipil di tahun 60-an.<sup>11</sup>

Sesungguhnya politik identitas adalah bermula di Amerika dengan tindakan diskriminatif dan rasialis dari kulit putih terhadap kulit hitam atau juga dalam bentuk penguasaan modal oleh kaum feodal dimana semua itu sepenuhnya didominasi dan dikuasai oleh kulit putih. Bahkan dalam tahap selanjutnya gerakan Martin Luther juga uskup-uskup yang ada disana, dengan dalih kebebasan dan keadilan sosial dan bukan karena alasan doktrin agama, yang ujung-ujungnya adalah karena mengalami suatu ketidakadilan, sehingga menuntut adanya persamaan (*equality*).

Jika dilihat dari rentang waktu, berawal di Amerika Serikat yaitu pada tahun 70-an ilmuwan sosial baru tertarik kepada isu politik, yaitu ketika muncul persoalan minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa termarginalkan. Hingga pada fase selanjutnya cakupan terminologi ini merambah pada persoalan keyakinan, agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beranekaragam.<sup>12</sup> Perihal menguatnya ekspresi politik identitas ternyata juga terjadi pada negara dan bangsa lain, seperti di Uni Soviet dimana bangsa-bangsa yang tergabung menginginkan kemerdekaan dan memisahkan diri. Begitu juga dengan kondisi di Jepang, dan Jerman yang pada saat pasca Perang Dunia II dimana kekuatan negara ini menjadi melemah.

---

<sup>10</sup> Penjelasan lebih detail tentang pergolakan gerakan masyarakat yang terkait dengan politik identitas baik di Barat maupun di Indonesia dapat dilihat di Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h. 4 Bandingkan dengan ; Francis Fukuyama, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment* (New York: Palgrave Macmillan, 2018), h.9.

<sup>11</sup> Ma'arif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, h. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 3.

Melihat dari gerakannya, narasi tentang politik identitas dengan argumen tujuan kesetaraan dan semakin menguatnya ekspresi kepentingan individu dan kelompok, ternyata tidak semuanya berujung atau pun memiliki target yang sama. Statemen ini mengindikasikan bahwa target munculnya ekspresi politik identitas harus pula dilihat dari masa atau pun era, pola gerakan, juga tujuan dimana politik identitas itu menampakkan dirinya yang berkaitan pula dengan era pramodern, modern dan postmodern.

Dalam konteks ini Von Beyme yang dikutip oleh Ubed Abdillah membuat analisis dengan melihat politik identitas melalui pola gerakan, motivasi dan tujuan yang ingin dicapai. Secara konkret analisis Beyme dapat dilihat pada tabel berikut:

Model Teori	Pola Keterangan	Pola Aksi	Tujuan Gerakan
Pra Modern	Perpecahan objektif (dimana terdapat perpecahan fundamental akan terdapat gerakan sosial yang menyeluruh)	Mobilisasi secara ideologis atas inspirasi pemimpin	Perampasan kekuasaan
Modern	Pendekatan kondisional (keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi)	Keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah	Pembagian kekuasaan
Postmodern	Gerakan tumbuh dari dinamikanya sendiri. Protes muncul dari berbagai macam kesempatan	Kesadaran diri	Otonomi

	individual, Tidak terdapat satu perpecahan yang dominan.		
--	--	--	--

*Sumber: Ubed Abdilah, 2002; 146.*

Meskipun pemetaan yang dilakukan oleh Beyme diatas lebih terkonsentrasi pada pola gerakan politik etnis, dimana pada masing-masing era seperti pra modern, modern dan post modern memiliki ciri gerakan yang khas sesuai dengan masanya, namun yang menjadi tekanan adalah terlah terjadi menguatnya sentimen yang bernuansa ke-etnisian yang dimana ketika sentimen itu muncul, maka terdapat keinginan untuk mengekspresikan diri atau kelompoknya yang dalam praktiknya bisa saja saling menghabisi atau membunuh terutama pada era pra modern. Namun ketika memasuki era modern dan post modern, gerakan politik mengalami dinamika sehingga ekspresi atau tujuannya tidak lagi untuk saling menghabisi, tetapi telah bergeser pada politik kebudayaan, kepemilikan atas hak-hak sosial dan otonomi, kebebasan berekspresi dan berbudaya.<sup>13</sup>

Sedangkan di Indonesia term politik identitas dapat dikatakan lebih terkait pada persoalan etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang pada umumnya diwakili oleh para elit dengan berbagai macam artikulasi. Isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat pokok dalam wacana politik mereka, termasuk juga wacana otonomi daerah.<sup>14</sup> Berbagai kepentingan isu tersebut menyeruak di tengah-tengah masyarakat yang ekspresi dan manifestinya mengalami berbagai macam bentuk, mulai dari yang sederhana sampai pada bentuk yang cukup mengkhawatirkan karena dapat merusak sendi-sendi komitmen integritas kebangsaan.

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro yang dikutip oleh Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, adalah di mana ada sebuah kelompok yang memiliki kesamaan tipologi dan karakteristik seperti ras, jender, agama, juga etnis yang

<sup>13</sup> Abdillah S, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, h. 147.

<sup>14</sup> Ma'arif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, h. 4.

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggotanya. Politik identitas disebut juga sebagai politik perbedaan. Politik identitas tidak lain adalah tindakan politis dengan cara-cara penyaluran aspirasi guna mempengaruhi kebijakan, dominasi terhadap distribusi nilai-nilai yang dianggap berharga sampai pada tuntutan yang paling mendasar, seperti penentuan nasib sendiri yang bersifat primordial dan sektoral. Dalam format keetnisan, politik identitas terlihat pada upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan menerapkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan, politik identitas terefleksikan dari berbagai macam upaya memasukkan nilai-nilai keagamaan pada proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.<sup>15</sup> Hal ini seperti yang telah dilaksanakan di Aceh juga daerah-daerah lain yang pernah mewacanakan hal serupa seperti di Garut Jawa Barat dan daerah lainnya. Harus diakui menguatnya ekspresi politik identitas pada sebuah wilayah atau pun negara, ternyata disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Untuk kasus di Indonesia dapat dikemukakan bahwa faktor internal disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang cenderung refresif dengan argumen menjaga stabilitas yang pada titik tertentu telah mengabaikan eksistensi hak masyarakat. Sedangkan faktor eksternalnya setidaknya dapat dikaitkan dengan kasus beberapa negara besar yang menghargai hak-hak kalangan *indigenous*, dimana pengalaman ini mengilhami kelompok masyarakat untuk turut pula mengekspresikan identitasnya.

Berdasarkan bacaan terhadap beberapa literatur ditemukan banyak definisi dan pengertian dari identitas politik, seperti yang dikemukakan oleh Cressida Heyes yang memberikan pengertian bahwa politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup keanggotaan dari kelompok dalam konteks

---

<sup>15</sup> Juhana Nasrudin and Ahmad Ali Nurdin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)," *Haniffiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018): h. 34-47.

yang lebih luas.<sup>16</sup> Begitu juga dengan konsep atau definisi yang dikemukakan oleh Agnes Heller bahwa politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Morowitz memberikan definisi bahwa politik identitas adalah memberikan garis demarkasi yang jelas pada penentuan siapa yang disertakan dan siapa yang ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.<sup>17</sup>

Jika menggunakan istilah yang digunakan oleh Mahmud, bahwa politik identitas merupakan kecenderungan sejumlah atau kelompok tertentu untuk membuat aliansi dan perilaku politik eksklusif. Politik identitas digunakan sebagai alat untuk membingkai klaim politik, mempromosikan ideologi, dan mengorientasikan tindakan sosial dengan tujuan untuk menegaskan kekhasan kelompok serta mendapatkan kekuatan dan pengakuan.<sup>18</sup>

Dengan begitu setidaknya dapat dipahami bahwa munculnya politik identitas baik yang berbasis suku, daerah, kultur, gender juga agama sebagai ekspresi dan pengedepanan dari keakuan atau ego-sektoral yang kuat, sehingga muncul klaim kelompok kita-kelompok mereka.<sup>19</sup> Ungkapan seperti itu, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesetaraan, atau juga menggumpalnya rasa primordial yang cukup tinggi, sehingga kadang kala ekspresi tersebut mengabaikan eksistensi kelompok lain.

#### **D. Politik Identitas *Versus* Hubungan Antar Agama di Indonesia**

---

<sup>16</sup> Cressida Heyes, *Identity Politic* (USA: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007), h. 25.

<sup>17</sup> Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas Di Rumah Lokal," h. 19-29.

<sup>18</sup> Mahmud, "Moderasi Karakter Asli Agama Islam," in *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), h.72.

<sup>19</sup> Hal ini juga diekplorasi oleh Kristianus, "Politik Dan Strategi Budaya Etnik Dalam Pilkada Serentak Di Kalimantan Barat," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 1 (2016): h. 87-101 Lihat juga; Mifdal Zusron Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): h. 111-116.

Menurut Siti Musdah Mulia bahwa secara genealogi terdapat perbedaan – setidaknya pada awal munculnya – politik identitas di Barat dengan yang ada di Indonesia. Misalnya di Amerika, politik identitas disana dihubungkan dengan kepentingan orang-orang yang menjadi anggota kelompok sosial yang merasa didiskriminasikan oleh kebijakan negara. Kelompok-kelompok yang muncul di paruh kedua abad ke-20 tersebut seperti aktivis pejuang gerakan kulit hitam, kesetaraan gender, homo seksual serta gerakan politik identitas lainnya, dimana mereka terdorong karena keinginan agar memperoleh kesamaan hak atas dominasi arus besar dalam sebuah bangsa dan negara.<sup>20</sup>

Sedangkan di Indonesia, politik identitas dilakukan oleh kelompok *mainstream*, dalam hal ini kelompok agama mayoritas, dengan niat ”menyingkirkan” kaum minoritas, karena dalam persepsi mayoritas tersebut, kelompok minoritas telah ”menyimpang” atau ”menyeleweng”. Hebatnya lagi, ini dilakukan bukan hanya oleh kekuatan masyarakat sipil, bahkan juga negara.

Kasus politik identitas (ke-etnisasi dan keagamaan) yang sangat aktual bahkan juga sangat menghebohkan terekam dalam memori kolektif masyarakat Indonesia yaitu peristiwa pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 yakni antara pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Saniaga Uno, juga Pemilihan Presiden tahun 2019 yang lalu. Perhelatan Pilkada DKI memberikan gambaran bahwa kecenderungan politik identitas dengan mengusung isu suku, agama dan ras yang dalam tataran praktiknya memiliki peran yang begitu kuat bahkan terkristalisasi sedemikian rupa sehingga memberikan tekanan psikologis kepada para konstituen. Ditambah pula persoalan kekurangan dewasa masyarakat dalam menggunakan media sosial, seakan memperumit persoalan kontestasi calon pemimpin dimaksud. Proses politik semacam itu disadari atau tidak akan menggerus demokratisasi di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, “Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme Di Indonesia,” in *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, ed. Ihsan Ali Fauzi and Samsu Rizal Panggabean (Jakarta: Democracy Project, 2012), h. 45.

<sup>21</sup> Lihat juga Juhana Nasrudin, “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022),” *Haniffa: Jurnal Studi Agama-*

Kontestasi persoalan ras, suku, juga agama terasa sangat kental ketika itu, dimana wacana yang dimunculkan adalah seakan-akan pertarungan harga diri antara kedua kubu pendukung calon gubernur. Tidak hanya media sosial yang ada di negeri ini yang memberitakan persoalan siapa yang akan menjadi nakhoda ibu kota, tetapi juga media asing pun tidak luput memantau dan memberitakan kasus Pilkada tersebut. Setidaknya yang menjadi fokus dan titik tekan dari berita yang berkembang adalah persoalan identitas yang melekat dari kedua calon pasangan Gubernur DKI, yakni pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Saiful Djarot Hidayat juga pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dimana keduanya tidak lain adalah representasi identitas yang bersifat keetnisan dan keagamaan, sehingga menjadikan *head line* diberbagai media.<sup>22</sup>

Berawal ketika Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI pada waktu itu berkunjung ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada 30 September 2016. Dihadapan masyarakat dan juga segenap Aparatur Sipil Negara, Ahok memberikan sambutan dengan mengutip Surat al-Maidah 51 dengan mengatakan “janganlah kalian mau dibohongi oleh ayat tersebut” hingga pada akhirnya menimbulkan gejolak dan reaksi hebat dari masyarakat.

Dalam video resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil pemerintahannya jika dia tak terpilih kembali. Namun, dia menyisipkan Surah Al Maidah ayat 51.<sup>23</sup> Ternyata penjelasan Ahok

---

*Agama* 1, no. 1 (2018): h. 34-47; Fukuyama, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, h. 86.

<sup>22</sup> Dalam konteks ini, media sosial pun turut pula berkontribusi terhadap kehidupan yang damai, sebab pengarusutamaan berita yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang. Selain itu, masyarakat yang cerdas dalam menerima berita dari media pun tak kalah pentingnya. Istilah Saring sebelum sharing pun menjadi bagian penting dalam menerima informasi. Lihat Idrus Ruslan and Indra Harahap, “Social Media and the Making of Religious Harmony in the Post-Truth Era,” in *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, vol. 492 (Atlantis Press, 2019), h. 84-88.

<sup>23</sup> merdeka.com, “Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Hingga Dibui 2 Tahun,” *Merdeka.Com*, last modified 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>.

yang mengutip al-Qur'an membuat umat Islam tersinggung bahkan marah. Hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama. Salah satu organisasi umat Islam yang merespon pernyataan MUI tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Syihab, hingga terjadi tuntutan dan demo besar-besaran sampai pada jilid 2, hingga akhirnya Ahok diadili dan divonis 2 tahun penjara.

Dalam konteks ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Lestari, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab menggumpalnya politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017:

1. Terdapat salah satu pasangan calon yang beretnis Cina (Tionghoa) dan beragama Kristen;
2. Sambutan Ahok yang mengutip Surat Al Maidah 51 memicu reaksi pro dan kontra pada masyarakat;
3. Terdapat peran media sosial yang begitu besar dalam proses pembentukan politik identitas masyarakat Muslim di Jakarta, sehingga memancing kemarahan sebagian besar umat Muslim;
4. Aksi bela Islam yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPFMUI), berhasil memobilisasi massa umat Islam yang tersinggung karena dianggap Ahok telah menghina al-Quran dan menuntut agar segera diproses di pengadilan.<sup>24</sup>

Begitu juga dengan kasus Pemilihan Presiden tahun 2019 yang baru saja terjadi. Terdapat dua kelompok yang sama-sama menjadi pendukung dua pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Lagi-lagi yang menjadi isu besar adalah identitas nasionalis dan identitas religius yang dikemas sedemikian rupa oleh masing-masing pendukung dan simpatisan calon, yang dalam aksinya sangat mudah untuk ditemukan dukungan dari masing-masing calon dengan penggunaan bahasa yang bersifat hasud, adu domba dan provokatif, sehingga jika masyarakat tidak menggunakan nalar yang dingin, maka akan sangat mudah untuk terbawa arah sebuah emosi dan kebencian yang pada gilirannya akan terjebak pada kehilangan objektivitas. Belum lagi, karena cakupan Pilpres adalah seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kesemuanya sudah meleak

---

<sup>24</sup> Dina Lestari, "Pilkada DKI 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia," *SIMULACRA* 2, no. 1 (2019): h. 31-37.

teknologi, tidak jarang ditemukan bahasa, gambar, juga video yang syarat dengan editing sehingga jika masyarakat tidak dewasa dan kurang teliti, maka tentu akan mudah terhasud oleh penggunaan media sosial dalam koteks seputar Pilpres.<sup>25</sup> Isu yang dijual pun tidak jauh dari nuansa politik identitas yaitu suku, ideologi juga agama. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan adalah kontestasi Pilpres mengarah pada dis-integrasi bangsa dan yang diakibatkan oleh melemahnya nasionalisme pada sebagian masyarakat Indonesia.

Artikulasi politik identitas ke-etnis dan keagamaan yang sangat mencolok seperti kebencian rasial (terutama terhadap etnis Tionghoa) sering dihembuskan oleh kelompok politik tertentu demi ambisi kemenangan kelompoknya. Pada kasus Pemilu 2019, ekspresi rasial tersebut sangat sering terdengar dengan istilah “anti asing dan anti aseng”. Hal tersebut menandakan bahwa politik identitas berbasis etnis juga agama masih menggejala dalam *landscap* politik modern Indonesia.<sup>26</sup> Bahkan dari Pilpres ini pula muncul istilah “cebong-kampret” yang dialamatkan pada masing-masing pendukung calon pasangan Presiden ketika itu, dimana sampai saat ini kedua istilah itu – jika dilihat dimedia online – masih sering digunakan oleh para pendukung dan simpatisan sebelumnya. Selain itu, sebutan pri dan non-pri tetap saja menjadi “jualan” pada setiap hajatan demokrasi lima tahunan, baik yang berskala kedaerahan maupun secara nasional. Terlepas dari persoalan tak-tik dan strategi dalam pemenangan calon yang didukung pada sebuah pesta demokrasi, namun faktanya sadar atau tidak bahwa cara yang dilakukan oleh para tim pemenangan maupun pendukung dan simpatisan ternyata semakin menguatkan jati diri politik identitas yang pada titik tertentu dapat saja memporak-porandakan integrasi bangsa.

Menurut Yeni Sri Lestari, bahwa perpecahan yang diakibatkan oleh pengelompokan politik berbasis identitas keagamaan dan nasionalisme ini menjadikan stabilitas negara terganggu dengan dibuktikan menguatnya mosi tidak percaya terhadap penyelenggara negara, penyebaran berita hoax, persekusi, terbatasnya ruang

---

<sup>25</sup> Ulasan secara baik dalam melihat penggunaan media sosial termasuk didalamnya dalam kasus Pemilihan Pemimpin (Nasional dan Daerah) lihat Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religious Hate Speech* (Jakarta: Quanta, 2019), h. 30.

<sup>26</sup> Bakry, *Multikulturalisme & Identitas Politik Dalam Teori Dan Praktek*, h. 224.

demokrasi, dan lain-lain. Substansi keberadaan politik identitas keagamaan bukanlah faktor utama yang berkontribusi pada melemahnya integritas nasional di Indonesia, melainkan identitas nasionalisme juga menjadi pemicu lahirnya ketidakharmonisan pada politik identitas di Indonesia saat ini.<sup>27</sup>

Begitu juga dengan persoalan politik identitas yang terkait dengan ideologi juga kedaerahan yang sampai saat ini masih saja menggejala pada masyarakat Indonesia, seperti isu antek PKI yang kembali “bangun” dan berkumandang. Dalam konteks ini, isu Tenaga Kerja Asing (TKA), yang dalam batas tertentu didominasi oleh TKA warga negara Cina, pun ikut meningkatkan intensitas menguatnya politik identitas. Hal tersebut dikarenakan Cina yang berhaluan komunis, namun seakan menjadi absah bekerja di Indonesia yang *notabene* adalah negara yang sangat kuat dengan keagamaan. Sentimen keetnisan, keagamaan juga pandangan ideologi pada persoalan ini tidak jarang menimbulkan berbagai macam rumor juga hasutan yang membuat resah dan pada batas tertentu sangat mengkhawatirkan.

Dalam konteks ini, setidaknya stateman yang dikemukakan oleh Mulia menampakkkan hubungan bahwa politik identitas (keagamaan) dalam hal ini agama Islam pada kelompok yang dianggap sebagai fundamentalis terwujud pada tiga bentuk kekerasan. *Pertama*, kekerasan fisik misalnya perusakan tempat ibadah termasuk juga penutupannya, atau pun tindak kekerasan fisik dalam arti menciderasi seseorang secara fisik, melukai bahkan melakukan pembunuhan. *Kedua*, berupa kekerasan simbolik atau kekerasan semiotik yang dalam prakteknya mengambil bentuk tulisan maupun ceramah, pidato yang bersifat provokatif dan terkesan melecehkan penganut dan agama tertentu. *Ketiga*, berupa kekerasan struktural, yang bisa saja berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun aparatnya sendiri.<sup>28</sup>

Persoalan lain yang tak kalah meresahkan seperti munculnya identitas berbasis kedaerahan dalam bentuk tuntutan perluasan

---

<sup>27</sup> Yeni Sri Lestari, “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama,” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): h. 19-29.

<sup>28</sup> Mulia, “Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme Di Indonesia,” h. 46.

daerah, otonomi daerah, bahkan isu pemisahan diri seperti Papua merdeka, Aceh Merdeka, Riau Merdeka, Bali Merdeka, Borneo Merdeka, Maluku Merdeka<sup>29</sup> dapat dipandang sebagai ekspresi semakin menguatkan politik identitas kedaerahan juga keagamaan. Meskipun untuk beberapa daerah tersebut umumnya muncul pada era pemerintahan Orde Baru atau pada awal Orde reformasi, kecuali Papua yang sampai saat ini masih terjadi insiden yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersenjata dengan tujuan membuat keresahan di masyarakat dan ketidak stabilan pemerintahan di daerah tersebut. Kelompok sipil bersenjata ini tidak jarang melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan (TNI/POLRI) juga masyarakat awam.

Sesungguhnya kasus demi kasus yang penulis sebutkan diatas adalah contoh kecil dari peristiwa yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, dimana peristiwa serupa pun muncul disana dengan kasus yang paling nyata adalah dalam konteks Pilkada dimana isu yang berkembang pun kurang lebih memiliki kemiripan yakni persoalan etnis, ras juga agama termasuk juga persoalan gender yang kesemuanya melekat pada cakupan politik identitas. Dalam prakteknya, terdapat “pemaksaan” kehendak oleh masing-masing kelompok untuk mengunggulkan identitas tertentu (baca: suku, agama, gender) sebagaimana yang mereka idolakan.

Sampai batas tertentu, memang ekspresi dan artikulasi politik identitas yang tidak bertanggungjawab dan belum dewasa tentu dapat mengancam hubungan antar agama yang telah terbangun. Karenanya tidak sedikit pengamat yang mengatakan bahwa semua itu justru dapat mengancam integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi disisi lain, menurut peneliti bahwa aspek lain yang juga perlu dilihat adalah kehidupan alam demokrasi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, dimana tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya gerakan yang berbasis politik identitas dengan berbagai macam basisnya, dikarenakan masih ada kelompok yang merasa kepentingan mereka belum terakomodir. Dalam hal ini Umar Suryadi Bakry menegaskan bahwa memang politik identitas adalah soal artikulasi kepentingan, maka sejauh pengartikulasian kepentingan tersebut dilakukan berbasis kepentingan untuk kesejahteraan dan

---

<sup>29</sup> Secara detail pembahasan daerah-daerah yang disebutkan diatas terdapat dalam Rozi, *Politik Identitas: Problematika Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua*.

kepentingan bersama (sebagaimana tujuan negara yaitu terciptanya rakyat yang adil, makmur dan sejahtera) yang telah di rumuskan dan disepakati bersama, maka sampai disini ekspresi politik identitas bukanlah suatu permasalahan.<sup>30</sup>

Indonesia sebagai negara yang mengharuskan setiap masyarakatnya untuk memeluk agama, hal tersebut bermakna bahwa tidak seorang pun yang diperkenankan untuk hidup di Indonesia manakala dia tidak beraveliasi pada agama tertentu, selain itu umat beragama dituntut pula untuk melakukan interaksi ke berbagai penganut agama yang ada. Dalam pelaksanaan interaksi antar umat beragama tersebut, jika tidak hati-hati, maka akan sangat rentan terjadinya hegemoni dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Hegemoni tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah menguatnya politik identitas dengan berbagai manifestasi dan artikulasinya.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ekspresi dan artikulasi politik identitas haruslah dilakukan atas dasar kepentingan bersama yang naratif<sup>31</sup> dan universal<sup>32</sup> dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi agar cita-cita negara mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera bukan sekedar mimpi, termasuk juga hubungan antar agama yang ada justru menjadi pemicu untuk “berlomba-lomba dalam kebaikan”.

## E. Kesimpulan

Pada tataran ideal, seharusnya rakyat Indonesia semakin dewasa dengan pengalaman kemerdekaan yang sudah 76 tahun dimana rakyat saat ini terikat oleh kontrak sosial yang pernah disepakati oleh pendiri bangsa, karena mereka menyadari bahwa

---

<sup>30</sup> Bakry, *Multikulturalisme & Identitas Politik Dalam Teori Dan Praktek*, h. 226.

<sup>31</sup>Term naratif disini adalah suatu penegasan pentingnya kembali kepada identitas naratif yakni seluruh ciri yang menjadi kekhasan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi kembali suatu bangsa sebagai kelompok yang setia kepada cita-citanya. Lihat Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslibat; Akar Kekerasan dan Diskriminasi* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 121.

<sup>32</sup>Haider menegaskan bahwa wacana orientasi politik identitas adalah solidaritas universal. Lihat Asad Haider, *Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump* (New York: Verso Publishing, 2018).

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras juga agama. Maka selayaknya, para penerus pendiri bangsa melanggengkan kesepakatan tersebut secara konsisten dan komitmen. Adanya keanekaragaman tersebut mensyaratkan munculnya keinginan untuk mengekspresikan kelompok sendiri atau yang disebut politik identitas. Dalam alam demokrasi, ekspresi politik identitas merupakan suatu ruang yang absah, akan tetapi tentu harus diartikulasikan berbasis kebersamaan dan keuniversalan sehingga dapat menemui cita-cita dan keinginan yang diharapkan. Dengan penempatan ekspresi politik identitas yang proporsional maka hubungan antar agama yang ada akan menjadi lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Abdillah S, Ubed. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiaterra, 2002.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. “Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas.” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 111–116.
- Bakry, Umar Suryadi. *Multikulturalisme & Identitas Politik Dalam Teori Dan Praktek*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ford, Richard Thomson. “Political Identity as Identity Politics.” *UNBOUND* 53, no. 1 (2005): 53–57.
- Fukuyama, Francis. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Palgrave Macmillan, 2018.
- Haboddin, Muhtar. “Menguatnya Politik Identitas Di Rumah Lokal.” *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1 (2012): 116–134.
- Heyes, Cressida. *Identity Politic*. USA: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Kristianus. “Politik Dan Strategi Budaya Etnik Dalam Pilkada Serentak Di Kalimantan Barat.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 1 (2016): 87–101.
- Lestari, Dina. “Pilkada DKI 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia.” *SIMULACRA* 2, no. 1 (2019): 31–37.
- Lestari, Yeni Sri. “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama.” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 19–29.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme*

*Indonesia*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012.

- Mahmud. "Moderasi Karakter Asli Agama Islam." In *Moderasi Beragama; Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- merdeka.com. "Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Hingga Dibui 2 Tahun." *Merdeka.Com*. Last modified 2017.  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>.
- Mulia, Siti Musda. "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme Di Indonesia." In *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, edited by Ihsan Ali Fauzi and Samsu Rizal Panggabean. Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Nasrudin, Juhana. "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)." *Haniffya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018): 34–47.
- Nasrudin, Juhana, and Ahmad Ali Nurdin. "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)." *Haniffya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018): 34–47.
- Rozi, Syafuan. *Politik Identitas: Problematika Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Ruslan, Idrus, and Indra Harahap. "Social Media and the Making of Religious Harmony in the Post-Truth Era." In *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492:84–88. Atlantis Press, 2019.
- Umar, Nasaruddin. *Jihad Melawan Religious Hate Speech*. Jakarta: Quanta, 2019.

